**ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA INDOMARET/ALFAMART TERHADAP USAHA KECIL DI KOTA MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**



OLEH:

MUH. TARUNA FIRDAUS

NIM: D1A014232

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2018**

**Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah**

**ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA INDOMARET/ALFAMART TERHADAP USAHA KECIL DI KOTA MATARAM**

Program Studi Ilmu Hukum



OLEH:

MUH. TARUNA FIRDAUS

NIM: D1A014232



Menyetujui

Pembimbing Pertama

Dr. Hirsanuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19621231198803101

ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA INDOMARET/ALFAMART TERHADAP USAHA KECIL DI KOTA MATARAM

Muh. Taruna Firdaus

D1A014232

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum usaha kecil dan mikro terhadap pendirian Alfamart/Indomaret serta dampak keberadaannya di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris dengan sampel yang diambil secara *Random sampling*, data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang hasilnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analistis. Hasil penelitian menyimpulkan yaitu bahwa hadirnya Alfamart/Indomaret memberikan dampak negatif kepada warung kecil seperti mengalami penurunan *omzet* penjualan dan berkurangnya pembeli. Bentuk perlindungan hukum usaha kecil dan mikro terhadap pendirian Alfamart/Indomaret diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai pelaksanaan perlindungan terhadap Usaha Kecil, Mikro di Kota Mataram.

**Kata Kunci : Dampak Alfamart/Indomaret, Perlindungan hukum, Usaha Kecil dan Mikro**

*THE ASPECT OF THE BUSINESS COMPETITION LAW INDOMARET/ALFAMART TOWARD SMALL BUSINESS IN THE CITY OF MATARAM*

*ABSTRACT*

 *This study aimed to know the form of legal protection of small businesses and micro toward the establishment of Indomaret/Alfamart as well as the impact of its existence in the city of Mataram. The study used normative and empirical legal research the sample taken by random sampling, the data is collected by the interview method, observation, and documentation which the result was analyzed by using descriptive analysis method. The result of the study concluded that the presence of Indomaret/Alfamart give negative impact to small business, such as decreased in sales profits and losing the customers. The form of legal protection for small and micro business towards the development of Indomaret/Alfamart is regulated in law Number 5 in 1999 about the Prohibition of Monopoly Practices and bad business competition, and Mataram’s regulation Number 9 in 2015 about Peopel’s Market, Shopping Centers, and Supermarkets as the implementation of protection for small micro businesses in the city of Mataram.*

***Keyword: Impact of Indomaret/Alfamart, Legal Protection, Small Micro Businesses***

1. **PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan ekonomi, masyarakat Indonesia mencoba peluang bisnis dengan membuka usaha, baik secara individu maupun kelompok. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara salah satunya dengan cara yang instan. Berdasarkan hal itu masyarakat membutuhkan suatu wadah yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka secara lengkap atau yang disebut dengan pasar. Pasar dalam kehidupan sehari-hari didefinisikan sebagai tempat umum yang melayani jual beli.

Menurut perkembangannya pasar dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni pasar ritel tradisional dan pasar ritel modern. Pasar ritel tradisional terdiri dari warung dan pedagang klontongan. Pasar ritel modern terdiri dari swalayan, supermarket dan minimarket.

Dari sekian banyak usaha ritel modern yang berkembang di Indonesia yang paling banyak dijumpai adalah Indomaret dan Alfamart. Indomaret sendiri dikelola oleh *PT Indomarco Prismatama (Indofood Group)* sedangkan Alfamart dikelola oleh dua perusahaan yakni *Alfa Group dan PT HM Sampoerna,Tbk.*[[1]](#footnote-1) Kedua pelaku usaha tersebut terus bersaing untuk mendapatkan laba, tidak hanya satu gerai yang ada pada setiap kota namun terdapat puluhan gerai yang berdiri untuk menarik minat serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Indomaret maupun Alfamart ini tersebar hampir diseluruh Indonesia.Di kota-kota besar jumlahnya mencapai puluhan. Hal ini juga dapat dijumpai di Kota Mataram, dimana kedua usaha ritel modern ini berdiri berdampingan saling bersaing untuk menarik minat konsumen. Indomaret dan Alfamart tersebut terletak di tempat yang strategis, selain itu tempat yang bersih dan dilengkapi pendingin ruangan membuat tempat-tempat ini lebih diminati oleh konsumen.

Untuk menghindari terjadinya penguasaan pasar dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur tentang larangan penguasaan pasar yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

Untuk menghindari terjadinya kerugian pada usaha kecil dan kepentingan masyarakat luas dapat terpenuhi tanpa merugikan konsumen, maka diperlukan persyaratan berupa kebijakan antimonopoli dan persaingan usaha beserta peraturan yang terkait lainnya.[[2]](#footnote-2) Diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembinaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Perbelanjaan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penyusun tertarik untuk meneliti tentang aspek-aspek hukum yang terdapat dalam persaingan usaha antara pasar retail modern dengan pasar retail tradisional di Kota Mataram dengan mengangkat judul “ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA INDOMARET/ALFAMART TERHADAP USAHA KECIL DAN MIKRO DI KOTA MATARAM”.

 Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap usaha kecil/mikro atas kehadiran Indomaret/Alfamart di Kota Mataram dan (2) Bagaimana dampak dari pendirian Indomaret/Alfamart bagi iklim usaha kecil dan mikro serta kebijakan Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum terhadap usaha kecil/mikro atas kehadiran Indomaret/Alfamart di Kota Mataram dan untuk mengetahui dampak dari pendirian Indomaret/Alfamart terhadap usaha kecil dan kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Secara Akademis, untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Pprogram Studi Strata Satu (1) Di Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Secara Praktis, untuk memberikan wawasan bagi peneliti dan memberikan informasi bagi pembaca mengenai aspek hukum persaingan usaha Indomaret/Alfamart terhadap usaha kecil di Kota Mataram.

 Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik studi kepustakaan (*Library Research*) dan analisis deduktif.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Dampak Pendirian Alfamart/Indomaret Terhadap Usaha Kecil Mikro Serta Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Menciptakan Iklim Usaha Sehat Di Kota Mataram.**

Perdagangan merupakan salah satu sektor dalam sistem perekonomian kita yang berperan menjembatani sektor produksi dengan konsumsi. Adapun bentuk perdagangan yaitu eceran (*Retail)* yang merupakan bentuk perdagangan yang langsung memenuhi kebutuhan hidup atau konsumsi orang banyak yang telah berkembang pesat di setiap daerah di kota mataram. Jenis perdagangan retail terbagi dua, yakni retai tradisional dan retail modern.

Dalam perkembangan pasar modern yang sangat pesat dapat berdampak kepada pasar tradisional. Karena pasar modern dikelola secara professional dengan dilengkapi dengan fasillitas yang memadai dan terkesan lebih nyaman daripada pasar tradisional, hal ini tentunya akan menarik perhatian konsumen sehingga lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan dengan berbelanja di toko modern salah satunya yaitu alfamart/indomaret.

 Untuk mengetahui dampak dari menjamurnya toko swalayan salah satunya yaitu alfamart/Indomaret maka peneliti melakukan pengumpulan data berdasarkan atas hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan pemilik warung kecil di sekitar *minimarket* di Kota Mataram dimana pada penelitian ini peneliti memfokuskan dampak kehadiran Alafamart/ indomaret terhadap pedagang kecil di sekitar Daerah Gomong di Kota mataram.

Berdasarkan atas penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pemilik warung kecil di daerah gomong di kota mataram terhadap munculnya Alfamart/Indomaret yaitu bahwa rata-rata atau dari sepuluh pemilik warung kecil merasakan dampak dari keberadaan alfamart/Indomaret, baik dampak positif dan negatif maupun yang merasakan kedua dampak tersebut. Dari 19 pemilik warung kecil, 16 pemilik warung kecil merasakan dampak negatif dari hadirnya Alfamart/Indomaret, 3 pemilik warung kecil merasa dampak positf dan merasa biasa saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan alfamatrt/Indomaretbukan hanya akan berdampak negatif saja tetapi berdampak positif dan bahkan tidak berdampak sama sekali kepada warung kecil yang telah ada sebelum didirikannya Alfamart/Indomaret, [[3]](#footnote-3) sedangkan

3 pemilik warung yang mengalami dampak positif dan merasa tidak mengalami perubahan atas hadirnya alfamart/indomaret disekitar warungnya. Dampak positif tersebut yaitu karena dapat memudahkan pemilik warung berbelanja ke alfamart/indomaretuntuk memenuhi kebutuhan warung dan rumah tangga apalagi jika alfamart/indomaret mengadakan promo harga barang, maka pemilik warung dapat membeli dan menjualnya kembali dengan harga normal di warungnya, hal tersebut tentunya dapat menguntungkan pemilik warung kecil.[[4]](#footnote-4)

Pemilik warung yang merasa tidak merasakan dampak dengan keberadaan alfamart/indomaret disebabkan karena mereka merasa pelanggan mereka masih setia berbelanja di warung mereka, hal tersebut disebabkan karena warga sekitar malas berbelanja ke alfamart/indomaret karena lokasinya yang di anggap lebih jauh dari rumah mereka sehingga membutuhkan barang dengan cepat dengan cara berbelanja di warung kecil yang dekat dengan rumah mereka dan para remaja sekitar daerah gomong lebih senang nongkrong di warung mereka dengan membeli rokok dan minuman seperti kopi atau minuman seduh lainnya karena dianggap lebih murah.[[5]](#footnote-5)

Adanya dampak-dampak yang dirasakan oleh pemilik warung kecil maka dibutuhkan suatu strategi dalam berjualan, strategi-strategi tersebut harus dilakukan untuk mengatasi dampak keberadaan alfamart/indomaretdi sekitar warungnya agar usaha mereka tetap bisa berjalan dan tidak mengalami tutup usaha. Seperti hal yang diungkapkan oleh Bapak Amat sebagai pemilik warung kecil di daerah gomong yang menyatakan bahwa :

“Strategi yang saya lakukan agar pelanggan dan masyarakat tetap berbelanja disini adalah dengan menyediakan barang yang tidak di jual di Alfamart/Indomaret salah satunya adalah kue/gorengan dan minuman seduh seperti pop ice, untuk menambah pemasukan serta memurahkan barang dagangan di warung ini”. [[6]](#footnote-6)

1. **Perlindungan Hukum Usaha Kecil/Mikro Atas Kehadiran Alfamart/Indomaret Di Kota Mataram**

Pada era globalisasi saat ini tentunya dapat berdampak buruk dan menyulitkan bagi UMKM dalam menjalankan usahanya. Romli Atmasasmita menyatakan ekses negatif dari kapitalisme ini tampak dari kasus-kasus persaingan curang dan monopoli dunia usaha tanpa peduli terhadap pebisnis kecil lokal dan menengah, baik dalam level domestik maupun pada level transaksi bisnis internasional.[[7]](#footnote-7)

Pemerintah telah berusaha untuk melindungi dan mengembangkan UMKM dari berbagai sektor, termasuk regulasinya adapun bentuk perlindungan hukum terhadap UMKM yang telah di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbunyi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d.kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; h. dukungan kelembagaan.

Selanjutnya adapun suatu kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menata toko swalayan yang di bangun di daerah kota mataram. Dalam hal ini dikeluarkanlah suatu peraturan yaitu Dalam Pasal (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan menjelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Berdasarkan atas Peraturan Presiden mengenai perizinan, tata ruang, dan zonasi di atur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang menyatakan bahwa: 1. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.; 2. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan; b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Selanjutnya pada Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang menyatakan bahwa: 1. Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya; 2. Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut : a, Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); b. Supermarket, 400 m2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter per segi); c. Hypermarket, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi); d. Department Store, diatas 400 m2 (empat ratus meter persegi); e. Perkulakan, diatas 5.000 m2 (lima ribu meterper segi).

Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram juga diatur mengenai ketentuan Pendirian dan Pembangunan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang diatur dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yang menyatakan pendirian dan pembangunan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta UMKM, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan; b. Memperhatikan jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan atau Toko Eceran paling dekat 100 m (seratus meter); c. Menyediakan areal parker dengan perbandingan paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar untuk Pasar Rakyat, dan paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang bersih, sehat *(hygienis),* aman, tertib, dan ruang public yang nyaman; e. Menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas, karyawan maupun pengunjung; f. Menyediakan fasilitas ibadah bagi kasyawan dan konsumen, kecuali dalam bentuk Minimarket; g. Khusus untuk Pasar Rakyat wajib membuka dan menyediakan akses terhadap transportasi umum.

Selanjutnya dalam pembangunan/pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhatikan beberapa ketentuan yang di atur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang menyatakan bahwa: a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Selain itu pusat perbelanjaan juga wajib menerima produk-produk usaha kecil untuk memasarkan produknya di dalam usahanya , hal ini dapat kita lihat dalam aturan yang di jabarkan dalam pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang menyatakan bahwa Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

**III. PENUTUP**

**A. Simpulan**

* + - 1. Dampak keberadaan toko swalayanterhadap UMKM di Kota Mataram yaitu mengalami penurunan omzet penjualan, berkurangnya pembeli, serta kemudian melakukan strategi dengan cara para pedagang melakukan pengurangan barang masuk agar menghindari terjadinya tidak terjual habis produk mereka hingga menjadi expired yang pada akhirnya tidak layak untuk di jual dan menjadikan waktu tutup warung menjadi lebih lama, dan menjual berbagai produk yang tidak di jual di toko swalayan seperti kue tradisional, gorengan dan minuman seduh sebagai penambah omzet mereka. Kebijakan Pemerintah Kota Mataram dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bertujuan untuk mengadakan hubungan kemitraan bagi pasar modern dengan UMKM terutama dalam hal pemasaran.
			2. Perlindungan hukum terhadap Usaha Kecil dan Mikro telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai pelaksanaan perlindungan terhadap Usaha Kecil, Mikro di Kota Mataram.
1. **Saran**

Pada penelitian ini peneliti menyarankan:

* + 1. Kepada Pemerintah sebaiknya membatasi Toko Swalayan sesuai kebijakan pemerintah agar tidak merugikan UMKM. Dengan luas kota Mataram ±61,30 km2 dengan jumlah tersebut Pemerintah Kota Mataram harus memberikan kuota izin pembangunan terhadap Alfamart/Indomaret agar tidak mematikan pedagang kecil di sekitarnya dan juga pemberian izin usaha terhadap retail modern Alfamart/Indomaret harus didirikan di jalan-jalan umum Pemerintah. Selanjutnya kepada warung kecil sebaiknya melakukan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, melengkapi barang jualan, menambah jenis jualan dan memperhatikan kebersihan warung serta menyusun barang jualannya dengan rapi agar konsumen tertarik berbelanja di warung kecil.
		2. Diharapkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota Mataram, mengenai peraturan-peraturan yang sudah ada seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern daerah serta Perutaran Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diharapkan agar dapat menerapkan peraturan yang ada dan lebih memperhatikan setiap pembangunan pendirian toko swalayan agar sesuai dengan kebijakan yang berlaku sehingga dapat melindungi pedagang kecil di Kota Mataram.

**IV. DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Atmasasmita, Romli. 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekontruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publising, Yogyakarta.

Kagramanto, L. budi. 2015, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999),* Edisi Revisi, Laros, Surabaya

**Makalah / Artikel / Jurnal**

Setya Wardani, Andhina. 2007, *Eksistensi Minimarket Waralaba Dalama Persaingan Usaha Di Pasar Ritel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Di Surakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN RI Nomor 33, TLN RI Nomor 3817

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, LN RI Nomor 93, TLN RI Nomor 4866.

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelamjaan dan Toko Swalayan, TLN Daerah Kota Mataram Nomor 9.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tentang Perdagangan, LN RI Nomor 45, TLN RI Nomor 5512.

1. Andhina Setya Wardani, *Eksistensi Minimarket Waralaba dalam Persaingan Usaha Di Pasar Ritel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Di Surakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007. hlm. 17. [↑](#footnote-ref-1)
2. L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999)*, Edisi Revisi, Laros, Surabaya, 2015, hlm.57. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hasil wawancara dengan Pedagang Kecil di Kota Mataram, Pada Tanggal, 11 September 2018 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid* [↑](#footnote-ref-5)
6. Hasil Wawancara, Amat Selaku Pemilik Warung Kecil Di Daerah Gomong, Pada Tanggal 20 September 2018 [↑](#footnote-ref-6)
7. Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekontruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publising, Yogyakarta, 2012. [↑](#footnote-ref-7)